

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES DALAM MENGEMBANGKAN AGROWISATA BELIMBING DESA WATESARI BALONGBENDO SIDOARJO

NOVIA MEGASARI  
(192020100007)

*Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP.,M.K.P.*

*Prodi Administrasi Publik  
Fakultas Bahasa, Hukum, dan Ilmu Sosial,  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*

# LATAR BELAKANG

Potensi desa merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi perekonomian masyarakat disekitarnya. Begitu pula pada hal tersebut pemerintah memiliki strategi dalam memudahkan desa pada pengelolaan potensi yang dimiliki desa dengan diadakannya UU No 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa disarankan agar mendirikan BUMDes

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes diharapkan dapat sebagai saran pengelolaan sumber daya, asset serta potensi yang terdapat pada desa. BUMDes sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia, pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan berbagai aturan turunannya telah mengatur BUMDes



# MENGAPA

## “Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo”

Karena BUMDes memiliki sebuah pilar kegiatan ekonomi yang berfungsi juga sebagai lembaga sosial dan komersial (kegiatan yang dilukan untuk mendapatkan keuntungan), BUMDes dapat disimpulkan bahwa sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipilih oleh pemerintah desa serta dilaksanakan dengan kekeluargaan dan profesional guna meningkatkan potensi desa dan memajukan perekonomian desa.



# Permasalahan Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari

Para anggota belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan



# PENELITIAN TERDAHULU

**Bartholy A.S. Lengo, 2021**

**“Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende”**

Hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja pada kebijakan dalam pendirian serta pengelolaan BUMDes Maju Bersama di Desa Wolotolo belumlah maksimal, karena rancangan struktur pengurus yang terdapat pada BUMDes Maju Bersama tidaklah sesuai dengan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2015

**Puguh Budiono, 2015**

**“Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpren Kecamatan Kanor)”**

Hasil penelitian ini didapati bahwa implementasi dari kebijakan yang terdapat pada Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro, faktor yang mempengaruhi hasil dari sebuah implementasi tersebut terdapat pada tempat kebijakan di berlakukan. Isi dari kebijakan telah mengatur jelas tentang proses pembentukan serta sampai pada sumber daya yang diperlukan

**Asep Suryadi, Budiman Rusli dan Mohammad Benny Alexandri, 2021**

**“Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”**

Pada hasil penelitian didapatkan kebijakan BUMDes yang terdapat di kecamatan Pameungpeuk dapat di implementasikan secara baik didasarkan pada aspek pada proses pembentukan, organisasi, pengelolaan, permodalan, AD & ART, adapun yang menjadi penghambat pada pengelolaan BUMDes pada faktor SDM, kondisi ekonomi dan karakter pada agen pelaksana



# METODE PENELITIAN

## JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif Deskriptif

### FOKUS PENELITIAN

Pada penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui tingkat keberhasilan pada proses Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata Belimbing desa Watesari Balongbendo Sidoarjo



### PENDEKATAN TEORI EDWARD III Implementasi Kebijakan :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.



### **LOKASI PENELITIAN :**

BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari,  
Kecamatan Balongbendo, Kabupaten  
Sidoarjo



### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA :**

- Observasi
- Wawancara
- Studi Pustaka



### **INFORMAN**

Kepala Desa Watesari, Kepala  
BUMDes Bina Sejahtera dan  
Staff–Staff BUMDes



### **SUMBER DATA :**

- Data Primer
- Data Sekunder

# Hasil dan Pembahasan

- Analisa yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera merujuk kepada model yang dikembangkan oleh Edward III yang terdiri dari empat indikator





# Komunikasi

- Transmisi komunikasi yang dijalankan oleh para pengurus BUMDes dengan masyarakat desa hingga saat ini berjalan dengan baik. Terdapat dua macam komunikasi yang dilaksanakan pada BUMDes Bina Sejahtera pertama meliputi komunikasi dengan masyarakat dan komunikasi terkait memperkenalkan produk dari BUMDes Bina Sejahtera, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat desa seperti sosialisasi melalui musyawarah desa, melalui rapat RT dan RW, melalui sosial media whatsapp, melalui orang ke orang.
- Dalam acara ini para pengurus BUMDes Bina Sejahtera memaparkan mengenai sejumlah kebijakan dan arah pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera selama ini kepada pemerintah desa. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat. Adapun cara untuk memperkenalkan produk UMKM ke masyarakat lebih luas yaitu melalui pameran produk UMKM meliputi kota Surabaya, Malang dan Batu.
- Adapun komunikasi pemasaran produk BUMDes Bina Sejahtera dilakukan melalui acara pameran produk BUMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu dalam acara syukuran desa juga diadakan pameran produk desa melalui bazar umkm hal ini guna untuk memperkenalkan produk BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat di Desa Wetesari.

# Sumber Daya

No	Jabatan	Nama
1	Penasihat	: Kepala Desa
2	Pelaksana Operasional	
	Ketua	: Drs. Nurul Cholidi, M.Pd.
	Bendahara	: Nur Fitriah, S.E.
	Sekretaris	: Arvin Maksum, S.Sos.
	Anggota (Unit Usaha I)	: Drs. Moch. Halim
	Anggota (Unit Usaha II)	: Anwarul Irfan.
3	Pengawas	: Aminudin Rifa'i
4	Anggota Lapangan	: Hendro
		: Joko Slamet
		: Siswoyo
		: Suliyono
		: Nur Aliman
		: Satono
		: Dulatif
		: Mas'ud

Pertama, sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut SK Kepala Desa Watesari Nomor 06 Tahun 2006 Tanggal 24 Juni 2016. Susunan kepengurusan BUMDes memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas BUMDes masing-masing dengan bagiannya. Adapun susunan kepengurusan anggota yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera menurut SK Kepala Desa Watesari Nomor 06 Tahun 2006 yakni sebagai berikut:



Adanya sumber daya yang memadai meliputi jumlah staff, kompetensi yang diwujudkan melalui latar belakang Pendidikan dan fasilitas yang diberikan oleh BUMDes maka dalam hal ini sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III dimana dalam imlementasi kebijakan yang mewajibkan adanya sumber daya meliputi staff dan adanya fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

# Sumber Daya

- Kedua, Sumber Daya Keuangan Tidak hanya itu sumber daya manusia pada BUMDes Bina Sejahtera juga didukung dengan sumber daya keuangan yang memadai. Dalam sumber daya keuangan BUMDes Bina Sejahtera didukung dengan adanya dana desa. Dan ini adalah Perkembangan penyertaan dana Desa pemerintah Desa watesari kepada BUMDes Bina Sejahtera mulai tahun 2016 sampai tahun 2021

**Tabel: II** Perkembangan Penyertaan Dana Desa Pemerintah Desa Watesari Kepada BUMDes Bina Sejahtera

Tahun	Anggaran
2016	Rp. 50.000.000
2017	Rp. 15.000.000
2018	Rp. 50.000.000
2019	Rp. 25.000.000
2020	Rp. 63.000.000
2021	Rp. 100.000.000

*Sumber : Laporan Keuangan BUMDes Bina Sejahtera, 2022*

- Adapun pada tabel 2 dana desa yang diberikan kepada BUMDes Bina Sejahtera terdiri dari Rp 15.000.000 sampai Rp 100.000.000. Total dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 dana desa yang diberikan kepada BUMDes Bina Sejahtera ini mencapai RP 303.000.000. Adanya suntikan dana desa ini diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan dalam mengembangkan BUMDes Bina Sejahtera.

# Disposisi

Dalam teori Edward III mengutarakan bahwa kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Artinya bahwa apabila sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil.

Dalam Disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya semua jajaran pengurus mulai dari ketua sampai jajaran dibawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti pada AD/ART BAB VII Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Pasal 8

## Ketua

- Melaksanakan kepemimpinan di organisasi BUMDes, Melaksanakan pengendalian kegiatan serta pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian terhadap pinjaman. Bertindak atas dasar nama lembaga dalam mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan pengembangan usaha atau lain-lain.

## Sekretaris

- Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam mendukung kegiatan Ketua BUMDes, melaksanakan kegiatan administrasi umum yang terdapat pada kegiatan operasional BUMDesa, sekretaris dan ketua meneliti kebenaran mengenai berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan, melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa, sekretaris dan ketua serta bendahara membahas dan memutuskan terhadap permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan

## Bendahara

- Menerima, menyimpan, serta membayarkan uang berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, membantu ketua membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak diwujudkan, Melaporkan posisi keuangan pada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan, menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDesa secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDesa yang sesungguhnya.

## Karyawan

- Apabila dipandang perlu, BUMDesa dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan, Bidang Survey dan sebagainya.

- Berdasarkan pada penelitian yang telah dibuat maka sikap atau kecenderungan staff BUMDes Bina Sejahtera dalam implementasi kebijakan sangat mendukung. Setiap staff mendukung terhadap implementasi kebijakan guna menciptakan BUMDes yang lebih baik lagi. Para staf juga sadar dan mendukung penuh dalam implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera.
- Staff juga akan memberikan respon berupa kritik dan saran apabila dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa sikap staff BUMDes Bina Sejahtera mendukung penuh terhadap implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan dari staff maka implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera akan dirasa sulit berhasil.

# Disposisi

- Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III menjelaskan bahwa struktur terpenting dari sebuah birokrasi adalah adanya prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP dan juga fragmentasi. Dua unsur ini merupakan unsur terpenting yang harus ada pada suatu birokrasi.
- Dalam penelitian ini apa yang telah dilakukan pada BUMDes Bina Sejahtera dapat ditemukan bahwa pada badan usaha ini sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP yang sudah tercantum pada AD/ART BUMDes Bina Sejahtera.

**Tabel: III** Jam Kerja Pengurus BUMDes Bina Sejahtera

Pelaksana Operasional	Hari Senin - Jumat Jam 08.00 - jam 15.00
Anggota Lapangan	Hari Selasa, Sabtu dan Minggu Jam 07.00 - jam 15.00

- Adapun SOP BUMDes Bina Sejahtera meliputi SOP mengenai system kepegawaian yang mengatur mengenai hari kerja karyawan, jam kerja kepada karyawan. Dalam SOP tersebut juga berisi mengenai operasional kerja BUMDes Bina Sejahtera meliputi SOP yang mengatur pelaporan keuangan, SOP yang mengatur pencatatan asset BUMDes dan SOP yang mengatur mengenai laporan kerja BUMDes Bina Sejahtera selama setahun kedepan. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu SOP ini belum sepenuhnya dijalankan oleh para anggota BUMDes akan tetapi secara keseluruhan sudah baik.



# Kesimpulan

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang termasuk pada usaha desa yang di kelola oleh pemerintahan desa. Hasil penelitian dan pembahasan ini menggunakan teori Edward III yaitu memiliki 4 peranan: Pertama, komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat desa dan kedua melalui pameran produk UMKM supaya lebih dikenal dengan masyarakat lebih luas.

Kedua Sumber Daya manusia yaitu Pengurus BUMDes mulai dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, serta anggota lainnya, tidak hanya itu BUMDes Bina Sejahtera juga memiliki Sumber Daya Keuangnya dimana Dana Desa yang disuntikkan mulai dari tahun 2016 hingga 2021 ini mencapai RP 303.000.000.

Ketiga yaitu Birokrasi dimana prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP ini menyampaikan peraturan Jam kerja Para Staff BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari.

Keempat, Disposisi adalah sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan dapat dikatakan berhasil, dalam Disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya semua jajaran pengurus mulai dari ketua sampai jajaran dibawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing seperti pada AD/ART.

# Foto Kegiatan Penelitian



Wawancara Di Kebun Agrowisata Belimbing  
Dengan Anggota Lapangan Bapak Siswoyo



Wawancara Dengan Ketua BUMDes Desa Watesari  
Bapak Nurul Cholidi

# TERIMA KASIH